

Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan Melalui Asurans Keberlanjutan:
Analisis Kualitas Pelaporan ESG di Indonesia (2023 – 2025)

Andarini Handriarti* , Herlin Tundjung Setijaningsih
Universitas Tarumanagara, Indonesia
Email: andarini.126251061@stu.untar.ac.id* , herlins@fe.untar.ac.id

Keywords:		ABSTRACT
Sustainability ESG; Corporate Sustainability Greenwashing	Assurance; Credibility; Reporting;	<i>Environmental, Social, and Governance (ESG) reporting is increasingly becoming a crucial tool in building corporate credibility, particularly amidst growing demands for sustainability transparency from investors, regulators, and stakeholders. In Indonesia, sustainability reporting obligations have been strengthened through POJK No. 51/POJK.03/2017 for financial services institutions, issuers, and public companies. However, the increasing number of sustainability reports has not always been accompanied by adequate disclosure quality, particularly regarding materiality, indicator measurability, data consistency, and the involvement of independent parties in the assurance process. This study aims to analyze the role of sustainability assurance in enhancing corporate credibility through the quality of ESG reporting in Indonesia for the period 2023 – 2025. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review and content analysis of regulations, reporting guidelines, and developments in sustainability reporting practices in the Indonesian capital market. The results of the study indicate that sustainability assurance plays a significant role in strengthening the reliability of ESG information, reducing the risk of greenwashing, increasing investor confidence, and encouraging companies to prepare more accountable reports. However, sustainability assurance practices in Indonesia still face challenges such as incompletely uniform standards, limited internal data availability, and unequal company understanding of the ESG materiality concept. This study recommends strengthening assurance standards, integrating ESG data into company management systems, and enhancing the capacity of auditors and sustainability assurance providers.</i>
Kata kunci:		ABSTRAK
Asuransi Keberlanjutan; ESG; Kredibilitas Perusahaan; Pelaporan Keberlanjutan; Greenwashing		<i>Pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin menjadi instrumen penting dalam membangun kredibilitas perusahaan, khususnya di tengah meningkatnya tuntutan investor, regulator, dan pemangku kepentingan terhadap transparansi keberlanjutan. Di Indonesia, kewajiban pelaporan keberlanjutan telah diperkuat melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Namun, meningkatnya jumlah laporan keberlanjutan belum selalu diikuti oleh kualitas pengungkapan yang memadai, terutama terkait materialitas, keterukuran indikator, konsistensi data, dan keterlibatan pihak independen dalam proses asurans. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asurans keberlanjutan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui kualitas pelaporan ESG di Indonesia periode 2023-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis isi terhadap regulasi, pedoman pelaporan, serta perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan di pasar modal Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa asurans keberlanjutan berperan penting dalam memperkuat keandalan informasi ESG, mengurangi risiko greenwashing, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong perusahaan menyusun laporan yang lebih akuntabel. Meskipun demikian, praktik asurans keberlanjutan di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa standar yang belum sepenuhnya</i>

seragam, keterbatasan kesiapan data internal, dan belum meratanya pemahaman perusahaan terhadap konsep materialitas ESG. Penelitian ini merekomendasikan penguatan standar asurans, integrasi data ESG dalam sistem manajemen perusahaan, serta peningkatan kapasitas auditor dan penyedia jasa asurans keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu keberlanjutan telah menjadi salah satu agenda utama dalam tata kelola perusahaan modern. Perusahaan tidak lagi hanya dinilai dari kinerja keuangan, tetapi juga dari kemampuannya mengelola dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi kerangka penting bagi investor dan pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi jangka panjang (Ardiana, 2022).

Di Indonesia, perhatian terhadap pelaporan keberlanjutan semakin kuat seiring dengan implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Regulasi ini menjadi dasar penting bagi perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. OJK mencatat POJK 51/2017 berlaku untuk sektor jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, sehingga pelaporan keberlanjutan tidak lagi bersifat sukarela sepenuhnya bagi entitas yang berada dalam cakupan regulasi tersebut.

Perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bursa Efek Indonesia melaporkan bahwa per Desember 2024 terdapat 882 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan, atau sekitar 94% dari seluruh perusahaan tercatat di BEI. Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, kepatuhan pelaporan keberlanjutan semakin meluas di pasar modal Indonesia.

Namun, peningkatan jumlah laporan keberlanjutan belum otomatis mencerminkan peningkatan kualitas informasi ESG. Banyak laporan keberlanjutan masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen strategis untuk mengukur, mengelola, dan mengomunikasikan kinerja keberlanjutan secara akurat. Dalam praktiknya, masih ditemukan pengungkapan ESG yang bersifat naratif, kurang didukung data kuantitatif, belum memiliki indikator yang konsisten antarperiode, serta belum menjelaskan secara memadai isu material yang paling relevan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan kredibilitas. Ketika informasi ESG tidak dapat diverifikasi secara memadai, pemangku kepentingan berisiko menerima informasi yang bias, tidak lengkap, atau bahkan menyesatkan. Salah satu risiko utama dalam pelaporan ESG adalah *greenwashing*, yaitu kondisi ketika perusahaan menampilkan citra seolah-olah berkelanjutan, tetapi tidak didukung oleh praktik dan data yang memadai. Dalam konteks ini, asurans keberlanjutan menjadi penting karena berfungsi sebagai mekanisme verifikasi independen atas informasi non-keuangan yang disampaikan perusahaan.

Asurans keberlanjutan merupakan proses penilaian independen terhadap kualitas, keandalan, dan kewajaran informasi keberlanjutan yang dilaporkan perusahaan. Melalui asurans, laporan ESG tidak hanya menjadi dokumen komunikasi, tetapi juga instrumen akuntabilitas yang dapat diuji. Asurans dapat meningkatkan kepercayaan investor,

memperkuat reputasi perusahaan, dan membantu manajemen memperbaiki sistem pengumpulan data ESG internal.

Urgensi asurans keberlanjutan juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya standar global. International Sustainability Standards Board (ISSB) dibentuk untuk mengembangkan standar pengungkapan keberlanjutan global yang berkualitas tinggi dan berfokus pada kebutuhan investor serta pasar keuangan. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Keberlanjutan telah mengesahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 pada 1 Juli 2025, dengan tanggal efektif 1 Januari 2027.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait asurans keberlanjutan dan kualitas pelaporan ESG. Simnett et al., (2009) melakukan studi internasional yang menemukan bahwa perusahaan di negara dengan sistem hukum yang kuat dan tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi cenderung mengadopsi asurans keberlanjutan untuk meningkatkan kredibilitas laporan mereka. (Kolk & Perego, 2010) mengidentifikasi bahwa determinan adopsi asurans keberlanjutan dipengaruhi oleh faktor seperti ukuran perusahaan, industri, dan tekanan dari pemangku kepentingan. (Junior et al., 2014) dalam analisis historis mereka menemukan bahwa praktik asurans keberlanjutan telah berkembang secara global, meskipun masih terdapat variasi yang signifikan dalam cakupan dan standar yang digunakan. (Farooq & de Villiers, 2017) melakukan tinjauan literatur komprehensif yang menyoroti bahwa pasar untuk jasa asurans keberlanjutan masih menghadapi tantangan dalam hal standardisasi dan kredibilitas penyedia jasa.

Di tingkat nasional, penelitian tentang asurans keberlanjutan di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada kepatuhan pelaporan keberlanjutan dan kualitas pengungkapan ESG, tanpa membahas secara mendalam peran asurans dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan. Penelitian yang ada umumnya belum menganalisis secara spesifik bagaimana asurans keberlanjutan dapat mengurangi risiko *greenwashing* dan meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengkaji kesiapan perusahaan Indonesia dalam menghadapi standar pengungkapan keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 yang akan efektif pada 2027. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis peran asurans keberlanjutan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui kualitas pelaporan ESG di Indonesia pada periode transisi 2023–2025, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan yang relevan dengan konteks Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana asurans keberlanjutan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui peningkatan kualitas pelaporan ESG di Indonesia pada periode 2023–2025. Periode ini dipilih karena mencerminkan fase transisi penting, yaitu meningkatnya kepatuhan pelaporan keberlanjutan, penguatan infrastruktur ESG di pasar modal, serta persiapan Indonesia menuju standar pengungkapan keberlanjutan yang lebih selaras dengan standar global.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelaporan ESG perusahaan di Indonesia pada periode 2023–2025, bagaimana peran asurans keberlanjutan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan, apa saja tantangan penerapan asurans keberlanjutan dalam pelaporan ESG di Indonesia, dan

bagaimana strategi penguatan kualitas pelaporan ESG melalui asurans keberlanjutan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelaporan ESG perusahaan di Indonesia periode 2023–2025, menjelaskan peran asurans keberlanjutan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan, mengidentifikasi tantangan penerapan asurans keberlanjutan dalam praktik pelaporan ESG, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat kualitas pelaporan ESG di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan di bidang tata kelola perusahaan dan pelaporan keberlanjutan, khususnya dalam memahami peran asurans keberlanjutan sebagai mekanisme peningkatan kredibilitas perusahaan melalui kualitas pelaporan ESG. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dalam merancang strategi pelaporan ESG yang lebih kredibel dan akuntabel, bagi regulator dalam merumuskan kebijakan penguatan asurans keberlanjutan, bagi penyedia jasa asurans dalam mengembangkan kapasitas dan standar praktik, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai rujukan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas asurans keberlanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis isi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peran asurans keberlanjutan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui kualitas pelaporan ESG.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yaitu regulasi, pedoman, laporan institusional, artikel ilmiah, dan publikasi resmi terkait pelaporan keberlanjutan dan ESG di Indonesia. Regulasi utama yang digunakan adalah POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan, publikasi Bursa Efek Indonesia terkait pelaporan keberlanjutan, serta perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen dianalisis berdasarkan empat fokus utama, yaitu kualitas pelaporan ESG, keberadaan asurans keberlanjutan, kontribusi asurans terhadap kredibilitas perusahaan, dan tantangan penerapan asurans di Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi dengan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan secara tematik berdasarkan indikator kualitas pelaporan ESG. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan temuan dengan teori legitimasi, teori pemangku kepentingan, dan konsep asurans keberlanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pelaporan ESG di Indonesia 2023 – 2025

Periode 2023 – 2025 menunjukkan perkembangan penting dalam praktik pelaporan ESG di Indonesia. Perusahaan publik semakin menyadari bahwa laporan keberlanjutan tidak hanya menjadi kewajiban kepatuhan, tetapi juga bagian dari strategi reputasi dan komunikasi

korporasi. Peningkatan jumlah perusahaan tercatat yang menerbitkan laporan keberlanjutan menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam praktik pelaporan perusahaan di Indonesia.

Peningkatan tersebut didorong oleh beberapa faktor. Pertama, adanya tekanan regulasi melalui POJK 51/2017. Kedua, meningkatnya perhatian investor terhadap risiko ESG. Ketiga, penguatan infrastruktur ESG oleh Bursa Efek Indonesia melalui berbagai pedoman dan inisiatif pelaporan. Keempat, meningkatnya kesadaran publik terhadap isu perubahan iklim, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan.

Namun, kualitas pelaporan ESG masih bervariasi. Sebagian perusahaan telah menyajikan laporan dengan indikator yang terukur, target yang jelas, serta keterkaitan dengan strategi bisnis. Akan tetapi, sebagian lainnya masih menyajikan laporan secara deskriptif dan belum menunjukkan hubungan yang kuat antara isu ESG dengan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan lagi sekadar ketersediaan laporan, tetapi kualitas, relevansi, dan keandalan informasi yang disampaikan.

Kualitas Pelaporan ESG di Indonesia

Kualitas pelaporan ESG dapat dilihat dari beberapa indikator utama, yaitu materialitas, kelengkapan, keterukuran, konsistensi, keterbandingan, dan verifikasi. Dari sisi materialitas, laporan ESG yang berkualitas harus mampu mengidentifikasi isu-isu keberlanjutan yang paling relevan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Misalnya, perusahaan energi perlu memberi perhatian besar pada emisi karbon dan transisi energi, sedangkan perusahaan perbankan perlu mengungkapkan pembiayaan berkelanjutan, risiko iklim, dan integrasi ESG dalam kebijakan kredit.

Dari sisi kelengkapan, laporan ESG perlu mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara proporsional. Banyak perusahaan cenderung lebih mudah mengungkapkan program sosial seperti CSR, donasi, dan pelatihan masyarakat, tetapi belum cukup mendalam dalam mengungkapkan aspek lingkungan dan tata kelola. Padahal, ESG menuntut keterpaduan antara kinerja sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Dari sisi keterukuran, laporan ESG yang kredibel harus menyajikan data kuantitatif. Misalnya, jumlah emisi, konsumsi energi, penggunaan air, jumlah kecelakaan kerja, komposisi gender, tingkat pelatihan karyawan, jumlah pelanggaran kepatuhan, serta target penurunan emisi. Tanpa data kuantitatif, laporan ESG akan sulit dievaluasi secara objektif.

Dari sisi konsistensi, perusahaan perlu menyajikan data antarperiode secara berkelanjutan. Konsistensi penting agar pembaca dapat menilai tren kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Apabila indikator berubah-ubah tanpa penjelasan, maka laporan menjadi sulit dibandingkan dan menurunkan kredibilitas perusahaan.

Dari sisi verifikasi, laporan ESG harus dapat diuji melalui dokumen pendukung, sistem pencatatan internal, dan pemeriksaan independen. Di sinilah asurans keberlanjutan memiliki peran strategis. Tanpa proses verifikasi, informasi ESG berisiko hanya menjadi klaim sepihak perusahaan.

Peran Asurans Keberlanjutan dalam Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan

Asurans keberlanjutan berperan sebagai mekanisme penguatan kredibilitas karena memberikan penilaian independen terhadap informasi ESG yang disampaikan perusahaan. Dengan adanya asurans, pemangku kepentingan memperoleh keyakinan bahwa data

keberlanjutan tidak hanya disusun untuk kepentingan citra, tetapi telah melalui proses pemeriksaan yang sistematis.

Pertama, asurans meningkatkan keandalan informasi ESG. Penyedia asurans akan menilai apakah data yang disajikan perusahaan memiliki dasar pencatatan yang memadai. Misalnya, data emisi harus didukung oleh metode perhitungan yang jelas, data konsumsi energi harus dapat ditelusuri, dan data sosial harus berasal dari sistem sumber daya manusia yang valid.

Kedua, asurans membantu mengurangi risiko *greenwashing*. *Greenwashing* dapat terjadi ketika perusahaan menonjolkan klaim keberlanjutan tanpa bukti memadai. Dengan pemeriksaan independen, klaim perusahaan dapat diuji sehingga informasi yang tidak akurat, berlebihan, atau tidak konsisten dapat dikoreksi sebelum laporan dipublikasikan.

Ketiga, asurans meningkatkan kepercayaan investor. Investor membutuhkan informasi ESG untuk menilai risiko jangka panjang perusahaan. Informasi ESG yang telah diasuransikan lebih dipercaya karena dianggap memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi. Hal ini dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap kualitas tata kelola dan manajemen risiko perusahaan.

Keempat, asurans memperkuat tata kelola internal. Proses asurans tidak hanya berdampak pada laporan akhir, tetapi juga mendorong perusahaan memperbaiki sistem pengumpulan data, koordinasi antarunit, dokumentasi kebijakan, serta pengawasan internal. Dengan demikian, asurans keberlanjutan berfungsi sebagai alat perbaikan manajemen, bukan sekadar formalitas pelaporan.

Kelima, asurans mendukung legitimasi perusahaan. Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan membutuhkan pengakuan bahwa aktivitasnya sesuai dengan ekspektasi sosial. Laporan ESG yang diasuransikan memberikan sinyal bahwa perusahaan serius menjalankan keberlanjutan dan bersedia diperiksa oleh pihak independen.

Tantangan Penerapan Asurans Keberlanjutan di Indonesia

Meskipun memiliki peran penting, penerapan asurans keberlanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah kesiapan data internal perusahaan. Banyak perusahaan belum memiliki sistem pencatatan ESG yang terintegrasi. Data ESG sering tersebar di berbagai departemen, seperti lingkungan, SDM, legal, operasional, CSR, dan keuangan. Kondisi ini menyulitkan proses verifikasi karena data tidak selalu terdokumentasi dengan standar yang sama.

Tantangan kedua adalah pemahaman perusahaan terhadap materialitas ESG. Sebagian perusahaan masih memandang laporan keberlanjutan sebagai kumpulan aktivitas sosial, bukan sebagai laporan strategis berbasis risiko dan peluang keberlanjutan. Akibatnya, laporan lebih banyak berisi narasi program, tetapi kurang mengungkap isu material yang benar-benar memengaruhi kinerja dan keberlanjutan bisnis.

Tantangan ketiga adalah biaya asurans. Bagi perusahaan besar, biaya asurans mungkin dapat dimasukkan sebagai bagian dari biaya kepatuhan dan tata kelola. Namun, bagi perusahaan menengah atau emiten dengan sumber daya terbatas, biaya asurans dapat dianggap sebagai beban tambahan. Hal ini dapat membuat perusahaan menunda penggunaan asurans independen.

Tantangan keempat adalah ketersediaan tenaga ahli. Asurans keberlanjutan membutuhkan kompetensi multidisipliner, meliputi akuntansi, audit, manajemen risiko, lingkungan, sosial, tata kelola, dan pemahaman standar pelaporan. Keterbatasan tenaga ahli dapat memengaruhi kualitas proses assurance.

Tantangan kelima adalah belum meratanya standar praktik. Meskipun terdapat standar internasional dan perkembangan standar nasional, implementasi di tingkat perusahaan masih beragam. Perbedaan pendekatan, indikator, dan metodologi dapat mengurangi keterbandingan laporan antarperusahaan.

Implikasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan terhadap Praktik ESG

Pengesahan Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 oleh DSK IAI pada 2025 menjadi momentum penting bagi penguatan kualitas pelaporan ESG di Indonesia. Standar ini diproyeksikan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih terstruktur, terutama terkait risiko dan peluang keberlanjutan yang memengaruhi prospek keuangan perusahaan. Standar tersebut efektif mulai 1 Januari 2027, sehingga periode 2025 – 2026 menjadi masa persiapan penting bagi perusahaan.

Implikasi utama dari perkembangan ini adalah meningkatnya kebutuhan terhadap data ESG yang lebih akurat dan dapat diaudit. Perusahaan tidak cukup hanya menyusun laporan keberlanjutan secara naratif, tetapi perlu menghubungkan informasi ESG dengan strategi, tata kelola, manajemen risiko, metrik, dan target. Dengan demikian, asurans keberlanjutan akan menjadi semakin relevan karena laporan ESG yang berbasis standar akan membutuhkan bukti dan sistem kontrol yang kuat.

Selain itu, perkembangan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia juga menunjukkan bahwa arah kebijakan nasional semakin menekankan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan. OJK menyatakan bahwa TKBI merupakan transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia dan menjadi bagian dari penguatan kerangka keuangan berkelanjutan nasional. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih hati-hati dalam mengklaim aktivitasnya sebagai berkelanjutan.

Strategi Penguatan Kualitas Pelaporan ESG melalui Asurans

Untuk memperkuat kualitas pelaporan ESG di Indonesia, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, perusahaan perlu membangun sistem data ESG yang terintegrasi. Sistem ini harus mampu mencatat, memantau, dan menyimpan data ESG secara konsisten. Data ESG sebaiknya tidak hanya dikumpulkan menjelang penyusunan laporan, tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen rutin perusahaan.

Kedua, perusahaan perlu memperkuat analisis materialitas. Identifikasi isu material harus melibatkan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan risiko bisnis. Dengan analisis materialitas yang baik, laporan ESG akan lebih fokus pada isu yang benar-benar penting, bukan sekadar menampilkan aktivitas yang bersifat promosi.

Ketiga, perusahaan perlu menggunakan indikator ESG yang terukur dan konsisten. Penggunaan indikator yang konsisten akan memudahkan pembaca menilai perkembangan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Indikator juga perlu disertai target, capaian, dan penjelasan apabila terjadi perubahan signifikan.

Keempat, perusahaan perlu meningkatkan kualitas tata kelola ESG. Dewan komisaris, direksi, dan komite terkait perlu memiliki peran yang jelas dalam pengawasan keberlanjutan. ESG tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab unit CSR, tetapi harus menjadi bagian dari strategi korporasi.

Kelima, perusahaan perlu mulai menerapkan asurans secara bertahap. Bagi perusahaan yang belum siap melakukan asurans menyeluruh, asurans dapat dimulai dari indikator ESG yang paling material, seperti emisi, keselamatan kerja, kepatuhan, atau tata kelola. Pendekatan bertahap memungkinkan perusahaan membangun kesiapan internal tanpa beban yang terlalu besar.

Keenam, regulator dan asosiasi profesi perlu memperkuat pedoman teknis asurans keberlanjutan. Pedoman yang jelas akan membantu perusahaan dan penyedia jasa asurans memahami standar minimum, cakupan pemeriksaan, serta bentuk laporan asurans yang sesuai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa asurans keberlanjutan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan melalui penguatan kualitas pelaporan ESG. Pada periode 2023–2025, praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan secara kuantitatif, ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan tercatat yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Namun, kualitas pelaporan masih menghadapi tantangan, terutama terkait materialitas, keterukuran data, konsistensi indikator, dan verifikasi informasi. Asurans keberlanjutan dapat meningkatkan keandalan informasi ESG, mengurangi risiko greenwashing, memperkuat kepercayaan investor, serta mendorong perbaikan sistem tata kelola internal perusahaan. Dengan adanya asurans, laporan ESG tidak hanya berfungsi sebagai dokumen komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas yang dapat diuji secara independen. Meskipun demikian, penerapan asurans keberlanjutan di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kesiapan data internal, biaya assurance, keterbatasan tenaga ahli, dan belum meratanya pemahaman perusahaan terhadap standar pelaporan ESG.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada perusahaan untuk membangun sistem data ESG yang terintegrasi dan memulai penerapan asurans secara bertahap pada indikator yang paling material, guna mempersiapkan diri menghadapi Standar Pengungkapan Keberlanjutan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2 yang akan efektif pada 2027. Bagi regulator, disarankan untuk memperkuat pedoman teknis asurans keberlanjutan dan mendorong harmonisasi standar praktik di tingkat nasional agar lebih selaras dengan standar global. Bagi penyedia jasa asurans, disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi multidisipliner, meliputi akuntansi, audit, manajemen risiko, lingkungan, sosial, dan tata kelola, guna menjamin kualitas proses asurans. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai efektivitas asurans keberlanjutan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi asurans keberlanjutan di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya standar pengungkapan berbasis IFRS S1 dan IFRS S2.

REFERENSI

- Ardiana, P. A. (2022). Conceptualising stakeholder engagement in sustainability reporting. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 1.
- Bursa Efek Indonesia. (2025). Enhancing ESG data transparency, IDX launches ESG reporting for listed companies. Indonesia Stock Exchange.
- Farooq, M. B., & de Villiers, C. (2017). The market for sustainability assurance services: A comprehensive literature review and future avenues for research. *Pacific Accounting Review*, 29(1), 79–106.
- García-Sánchez, I.-M., Hussain, N., Aibar-Guzmán, C., & Aibar-Guzmán, B. (2022). Assurance of corporate social responsibility reports: Does it reduce decoupling practices? *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 31(1), 118–138. <https://doi.org/10.1111/beer.12394>
- García-Sánchez, I.-M., Hussain, N., Aibar-Guzmán, C., & Aibar-Guzmán, B. (2025). ESG controversies and external assurance: Examining their impact on firm value and image. *The British Accounting Review*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2025.101704>
- Hazaea, S. A., Zhu, J., Khatib, S. F. A., Bazhair, A. H., & Elamer, A. A. (2021). Sustainability assurance practices: A systematic review and future research agenda. *Environmental Science and Pollution Research*, 29, 4843–4864. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-17359-9>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). Indonesia launches sustainability disclosure standards based on IFRS S1 and S2. IAI Global.
- International Sustainability Standards Board. (2024). About the International Sustainability Standards Board. IFRS Foundation.
- Junior, R. M., Best, P. J., & Cotter, J. (2014). Sustainability reporting and assurance: A historical analysis on a world-wide phenomenon. *Journal of Business Ethics*, 120(1), 1–11.
- Kolk, A., & Perego, P. (2010). Determinants of the adoption of sustainability assurance statements: An international investigation. *Business Strategy and the Environment*, 19(3), 182–198.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Keuangan berkelanjutan. OJK.
- Puspita, N., & Jasman, J. (2022). Pengaruh laporan keberlanjutan (sustainability report) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 63–69. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.63-69>
- Simnett, R., Vanstraelen, A., & Chua, W. F. (2009). Assurance on sustainability reports: An international comparison. *The Accounting Review*, 84(3), 937–967.
- Vander Bauwhede, H., & Van Cauwenberge, P. (2022). Determinants and value relevance of voluntary assurance of sustainability reports in a mandatory reporting context: Evidence from Europe. *Sustainability*, 14(15), 9795. <https://doi.org/10.3390/su14159795>

- Yuan, X., Li, Z., Xu, J., & Shang, L. (2022). ESG disclosure and corporate financial irregularities – Evidence from Chinese listed firms. *Journal of Cleaner Production*, 332, 129992. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129992>
- Zulaikha, & Indyanti, J. A. (2017). Assurance laporan keberlanjutan: Determinan dan konsekuensinya terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 103–116.